

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BLORA)**

Tri Widayati

Fakultas Ekonomi UNTAG Semarang

Email : Triwiedy3@yahoo.com

ABSTRACT

The increase in revenue is a phenomenon that appears in almost all regencies / cities in Indonesia after decentralization. Various attempts were made by the respective District / City to find the source of opportunities for revenue enhancement efforts in general ini. General condition in Blora indicates a source of revenue that has been effective, but there are also some that have not been effective.

Problems that arise in the financial management of this area is still weak surveillance systems and human resources are limited there are still some Registration charges that the manual so that the data is often lost and is often not clear. Potential leak large enough in levies withdrawal. Less painstaking officer in retribution for withdrawing the levy rates are set very low, eg market services This should be done by the district in an effort to increase revenue Blora is the revamping of existing legislation, including that there is no legal umbrella for example tax bracket c excavation, technological improvements , data collection all the taxpayer money and increased monitoring.

Key word: PAD, Effectiveness

ABSTRAK

Peningkatan PAD menjadi sebuah fenomena yang muncul di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia setelah era otonomi daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari sumber peluang untuk upaya peningkatan PAD ini. Kondisi secara umum di Kabupaten Blora menunjukkan adanya sumber penerimaan yang sudah efektif, namun ada juga beberapa yang belum efektif.

Permasalahan yang biasa muncul dalam pengelolaan keuangan daerah ini adalah masih lemahnya sistem pengawasan dan sumber daya manusia yang terbatas Pencatatan retribusi masih ada beberapa yang manual sehingga data sering hilang dan sering tidak jelas. Potensi kebocoran yang cukup besar dalam penarikan retribusi daerah. Petugas kurang telaten dalam melakukan penarikan retribusi karena tarif retribusi yang ditetapkan sangat rendah, misal pelayanan pasar. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Blora dalam upaya peningkatan PAD adalah dengan pembenahan Perda yang ada, termasuk yang belum ada payung hukumnya misalnya pajak galian golongan c, perbaikan teknologi, pendataan uang semua wajib pajak dan peningkatan monitoring.

Kata Kunci : PAD, Efektifitas

Latar Belakang

Pengembangan otonomi daerah di Indonesia secara diatur di dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini memberikan otonomi atau kewenangan secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Berdasar pada pada Pasal 157 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu item dalam fungsi manajemen pembangunan terutama pada penganggaran kegiatan dan program pembangunan suatu daerah.

Data Blora Dalam Angka 2012 menunjukkan bahwa kondisi pendapatan daerah Kabupaten Blora pada 2011, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2010 total pendapatan sejumlah 809 milyar, pada 2011 meningkat menjadi 1trilyun. Pendapatan tersebut berasal dari PAD sejumlah 67 milyar, dana perimbangan 712.3 milyar dan dari lain pendapatan yang sah sebesar 228.3 milyar. Pada 2010 PAD tertinggi berasal dari retribusi daerah sebesar 23.9 milyar, maka pada tahun 2011 PAD tertinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu sejumlah 41.2 milyar. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 547.1 milyar. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan maka perlu strategi dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah agar selaras dengan rencana pembangunan dan pengembangan Kabupaten Blora.

Meskipun, data PAD Kabupaten Blora dari komponen pajak dan retribusi daerah tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, perlu dikaji apakah kenaikan realisasi tersebut sudah sesuai dengan besarnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Blora. Mengingat PAD merupakan komponen penting suatu daerah untuk membiayai belanja suatu daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai berapa potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Blora, dimana diharapkan dengan kajian ini bisa menemukan dan mengenali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan besarnya PAD Kabupaten Blora.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Identifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
- b. Menganalisis efektifitas pajak dan retribusi daerah
- c. Menganalisis potensi pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk digali sebagai sumber PAD yang potensial di Kabupaten Blora
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber PAD
- e. Menyusun kebijakan terkait dengan meningkatkan pendapatan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora. Analisis Data menggunakan Analisis Efektivitas Potensi dan Realisasi Pajak Retribusi dan Analisis SWOT.

Analisis Potensi dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam menyusun Kajian Upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Blora langkah yang ditempuh adalah:

1. Mengidentifikasi peraturan tentang pengelolaan dan penataan pajak dan retribusi daerah yang menyangkut Perda, Peraturan lain tentang pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya identifikasi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah, hal ini menyangkut kuantitatif dan kualitatif pajak dan retribusi daerah. Setelah identifikasi dilakukan maka dapat diketahui permasalahan PAD dan potensinya. Dari permasalahan dan potensi PAD dapat dilakukan penanganan yang tepat dan efektif mulai dari subyek dan obyek pajak/retribusi yang akan dipungut, tarif pajak dan retribusi yang semestinya dipungut, dan cara pemungutan/kelembagaan yang efektif, dan dimungkinkan pengelolaan BUMD.
2. Mendata semua Wajib Pajak, Obyek Pajak, Tarif pajak, tarif retribusi.
3. Menghitung potensi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel dan Restoran
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Sarang Burung Walet
 - f. Pajak Penerangan Jalan
4. Penghitungan Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungutan}}{\text{Penerimaan Pajak yang dipungut}} \times 100\%$$

Analisis SWOT

Strategi untuk melihat kekuatan-kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Blora dengan analisis SWOT, dimana identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi di bidang keuangan daerah.

Analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan Faktor Internal Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*) (Rangkuty,1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora

PAD di Kabupaten Blora selama 5 tahun terakhir (2009-2013) terus menerus mengalami kenaikan. Dari 13 Badan / Dinas / Kantor bagian penghasil PAD di Kabupaten Blora, dinas yang mengurus Penghasil PAD adalah DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. R Soetijono Blora, RSUD Dr. Soeprpto Cepu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi

dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, Dinas Kelautan, Diperindangkop dan UMKM, dan SETDA.

Dari DPPKAD, banyaknya realisasi PAD yang dihasilkan di tahun 2009 adalah Rp. 25.785.746.681 kemudian menurun menjadi Rp. 22.728.822.643 (2010). Selama 3 tahun terakhir (2011-2013) nilai realisasi yang dihasilkan DPPKAD Kabupaten Blora selalu meningkat, hingga tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 35.470.601.210. Jenis pajak daerah di Kabupaten Blora yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pajak daerah adalah pajak hotel dan restoran

Rincian besarnya retribusi daerah yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan untuk retribusi perijinan tertentu tahun 2013 sebesar Rp. 768.518.366, retribusi IMB sebesar Rp 525.397.046, retribusi ijin tempat minuman berakohol sebesar Rp. 10.000.000 retribusi ijin HO sebesar Rp. 233.121.320. Realisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, untuk retribusi daerah sebesar Rp. 3.934.534.750, retribusi itu berupa pelayanan kesehatan, dan dari pos lain-lain pendapatan yang sah (penjualan obat-obat dan hasil farmasi) sebesar Rp. 32.325.000.

Realisasi Retribusi daerah dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 68.860.000, berupa retribusi penyediaan / penyedotan kaskus sebesar Rp 1.500.000, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 67.360.000. Retribusi penggantian biaya KTP dan akte yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blora di tahun 2013 sebesar Rp. 1.400.000, retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 343.700.000, dan dari pos lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan denda retribusi umum) sebesar Rp. 343.700.000. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2013 Kabupaten Blora yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika adalah Rp. 164.677.500, retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 51.659.800, retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 843.636.120. Retribusi terminal sebesar Rp. 92.039.000. Retribusi ijin trayek sebesar Rp 4.045.000. Sedangkan perkembangan pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan / Dinas / Kantor di Kabupaten Blora, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Realisasi PAD (Rp) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013
Menurut Badan / Dinas / Kantor / Bagian Penghasil PAD

No	Badan/Dinas/Kantor Penghasil PAD	2009	2010	2011	2012	2013
1	DPPKAD	25,785,746,681	22,728,822,643	28,730,030,107	35,470,601,210	30,095,655,078
	Pajak daerah	7,980,307,893	9,331,027,882	11,130,718,509	11,474,133,665	10,556,737,483
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,201,237,197	3,088,360,733	5,884,626,373	5,758,248,478	6,165,994,267
	Bag. Laba atas penyertaan modal pada BUMD					-
	Lain-Lain PAD Yang Sah	15,604,201,591	10,309,434,028	11,714,685,225	18,238,219,067	13,372,923,328
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	849,415,094	921,950,755	881,400,275	379,873,000	1,537,036,732
	Retribusi Perijinan Tertentu	849,415,094	921,950,755	881,400,275	379,874,550	1,537,036,732
3	Dinas Kesehatan	2,332,294,539	2,295,910,940	3,014,563,628	4,688,796,770	3,934,534,750
	Retribusi Daerah	2,332,294,539	2,295,910,940	3,009,498,628	4,668,640,690	3,934,534,750
	Retribusi Jasa Umum	2,267,769,539	2,231,806,200	2,997,202,108	4,666,681,630	3,902,209,750
	Retribusi Jasa Usaha	-	1,854,740	1,546,520	1,959,060	-
	Retribusi Perijinan Tertentu	64,525,000	62,250,000	10,750,000	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	5,065,000	20,156,080	32,325,000
4	RSUD Dr. R. Soetijono Blora	8,759,135,040	9,518,350,227	15,069,524,668	17,507,313,511	10,921,386,746
	Retribusi Daerah	8,759,135,040	9,518,350,227	15,069,524,668	17,507,313,511	-
	Retribusi Jasa Umum	8,757,107,300	10,163,100,000	11,215,800	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	2,027,740	1,324,080	-	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,027,740	1,324,080	-	-	-
	Lain-Lain PAD Yang Sah	-	-	15,058,308,868	-	10,921,386,746
5	RSUD Soeprapto Cepu	7,531,460,211	7,223,611,558	14,292,070,118	18,560,529,329	12,280,871,069
	Retribusi Daerah	7,531,460,211	7,223,611,558	86,363,341	-	-
	Retribusi Jasa Umum	7,503,552,211	7,211,791,558	68,753,341	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	25,188,000	11,820,000	17,610,000	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2,720,000	-	14,205,706,777	-	12,280,871,069
6	Dinas Pekerjaan Umum	542,034,454	747,156,000	760,376,500	167,098,500	122,687,694
	Pajak daerah	113,648,948	57,467,500	3,886,750	-	-
	Retribusi Daerah	288,937,345	303,086,500	342,280,300	9,810,000	68,860,000

No	Badan/Dinas/Kantor Penghasil PAD	2009	2010	2011	2012	2013
	Retribusi Jasa Umum	48,460,800	53,076,500	78,505,300	-	1,500,000
	Retribusi Jasa Usaha	240,476,545	250,010,000	263,775,000	9,810,000	-
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	139,448,161	83,515,500	71,929,150	147,478,500	53,827,694
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	146,459,500	80,298,500	134,690,500	257,646,000	688,800,000
	Retribusi Daerah	146,459,500	80,298,500	134,690,500	7,996,000	345,100,000
	Retribusi Jasa Umum	146,459,500	80,298,500	134,690,500	5,796,000	-
	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	2,200,000	1,400,000
	Lain-Lain PAD Yang Sah	-	-	-	249,650,000	343,700,000
8	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi, dan Informatika	805,255,900	835,138,000	1,039,833,750	1,442,749,000	1,241,369,520
	Pajak daerah	23,000,000	38,510,000	42,770,000	12,650,000	-
	Retribusi Daerah	782,255,900	774,612,400	977,127,250	1,410,793,920	1,226,477,020
	Retribusi Jasa Umum	479,503,500	474,715,500	576,406,250	1,135,331,420	1,059,973,420
	Retribusi Jasa Usaha	290,318,900	288,290,900	385,826,000	271,785,500	162,458,600
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36,009,500	51,100,000	-	-	4,750,000
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	166,726,870	179,572,300	278,444,700	274,905,800	203,760,100
	Retribusi Daerah	166,726,870	179,572,300	278,444,700	274,905,800	203,760,100
	Retribusi Jasa Usaha	166,726,870	179,572,300	278,444,700	274,905,800	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	203,760,100

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Efektifitas Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora

Hasil penghitungan dan analisis Efisiensi disajikan dalam Tabel 2., sebagai berikut :

Tabel 2
Rangkuman Efektifitas Potensi & Realisasi Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Blora

Keterangan	Efektifitas Potensi (2013)	Efektifitas Realisasi (2013)	Kesimpulan
Pajak			
Pajak Hotel	Sangat Efektif	Sangat Efektif	
Pajak Restoran	Sangat Efektif	Sangat Efektif	
Pajak Hiburan	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Bisa ditingkatkan
Pajak Reklame	Efektif	Efektif	
Pajak Parkir	Kurang Efektif	Efektif	Bisa ditingkatkan
Pajak Galian Golongan C	Tidak Efektif	Efektif	Bisa ditingkatkan
Retribusi			
Retribusi Kesehatan	Efektif	Sangat Efektif	
Retribusi Terminal	Efektif	Tidak Efektif	Target Realisasi tidak tercapai
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	Efektif	Kurang Efektif	Target Realisasi tidak tercapai
Retribusi Pelayanan Pasar	Efektif		
Retribusi Penggantian Biaya Cetak & KTP	Efektif	Efektif	
Retribusi Pengujian Kendaraan	Sangat Efektif	Efektif	
Retribusi Rumah Potong Hewan	Tidak Efektif		Bisa ditingkatkan

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Analisis SWOT Retribusi Daerah

Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan di dalam penarikan retribusi daerah di Kabupaten Blora, antara lain :

1. Adanya ketentuan yang cukup kuat dalam bentuk Perda tentang retribusi daerah.
2. Semakin tingginya dorongan legislatif untuk meningkatkan PAD.
3. Penarikan retribusi relatif lebih mudah.
4. Adanya potensi Pemda dalam rangka penegakan Perda tentang retribusi daerah.

Kelemahan di dalam penarikan pajak daerah di Kabupaten Blora antara lain :

1. Pencatatan retribusi masih ada beberapa yang manual sehingga data sering hilang dan sering tidak jelas.
2. Potensi kebocoran yang cukup besar dalam penarikan retribusi daerah.
3. Petugas kurang telaten dalam melakukan penarikan retribusi karena tarif retribusi yang ditetapkan sangat rendah, misal pelayanan pasar.

Peluang dari retribusi daerah yang bisa ditangkap adalah :

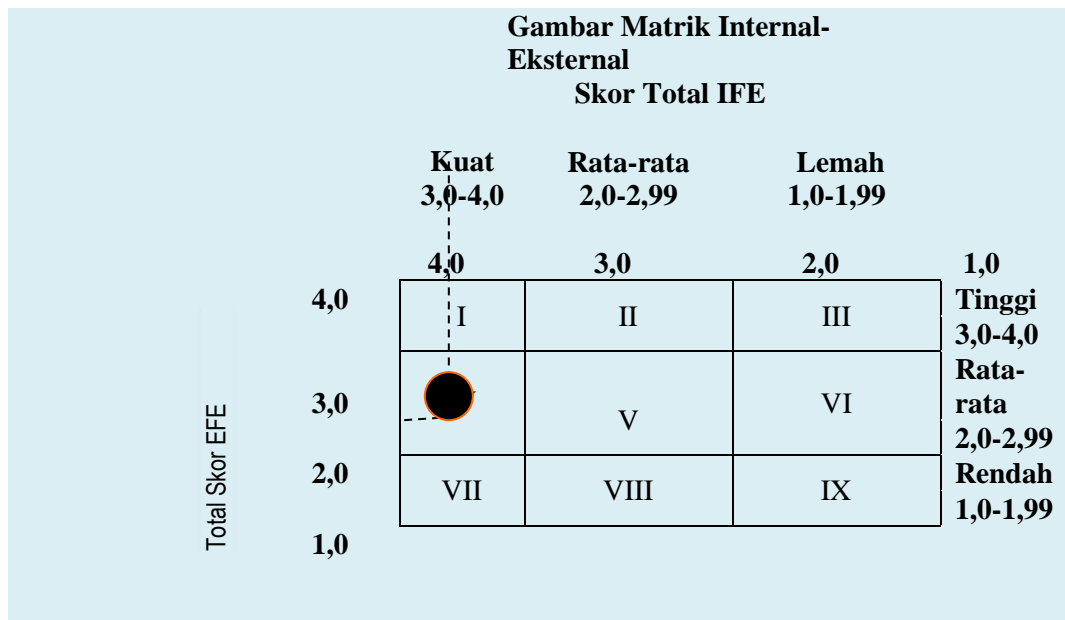
1. Potensi retribusi daerah di Kabupaten Blora sangat tinggi.
2. Belum maksimalnya potensi retribusi daerah yang digali secara optimal.
3. Tantangan untuk meningkatkan retribusi daerah.
4. Keinginan meningkatkan kinerja retribusi daerah agar efektif atau sangat efektif.

Ancaman dari retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Penarikan “keamanan” oleh oknum di luar Dinas (preman) yang menyebabkan obyek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah, misal retribusi pasar.
2. Preseden buruk karena tidak / belum pernah ditegaskan Perda tentang retribusi daerah.

Dengan menggunakan hasil potensi retribusi daerah dari matriks IFE dan EFE, matriks IE dapat dikerjakan. Sumbu horizontal matriks IE adalah skor total IFE 3,50 sedangkan sumbu vertikal adalah skor total EFE yaitu 2,30 posisi yang tepat adalah berada pada sel IV.

Gambar 1
Hasil Analisis SWOT



Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Dengan memperlihatkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka dapat disusun analisis SWOT yang menjadi arahan penyusunan rencana strategis potensi PAD dari komponen retribusi daerah pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3
Matriks Analisis SWOT Potensi PAD Dari Komponen Retribusi Daerah
Kabupaten Blora
Terhadap Rencana Strategis

	Kekuatan	Kelemahan
IFE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan yang cukup kuat dalam bentuk Perda retribusi daerah. 2. Semakin tingginya dorongan legislatif untuk meningkatkan PAD. 3. Penarikan retribusi relatif lebih mudah. 4. Adanya potensi Pemda dalam rangka penegakkan Perda tentang retribusi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan retribusi masih ada beberapa yang manual sehingga data sering hilang & sering tidak jelas. 2. Potensi kebocoran yang cukup besar dalam penarikan retribusi daerah. 3. Petugas kurang telaten dalam melakukan penarikan retribusi karena tariff yang ditetapkan sangat rendah, missal pelayanan pasar.
EFE		
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi retribusi daerah di Kabupaten Blora sangat tinggi. 2. Belum maksimalnya potensi retribusi daerah yang digali secara optimal. 3. Tantangan untuk meningkatkan retribusi daerah. 4. Keinginan menaikkan kinerja retribusi daerah agar efektif atau sangat efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas perlu tegas managih retribusi kepada wajib pajak, supaya tidak ada keterlambatan atau penundaan pembayaran retribusi. 2. Perlu mengkaji ulang tarif retribusi, agar nilainya tidak terlalu rendah, supaya potensi retribusi tinggi. 3. Penegakkan perda retribusi secara tegas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas petugas agar lebih telaten, walau besarnya retribusi kecil, akan tetapi itu sangat bermanfaat bagi daerah. 2. Pengawasan yang ketat dan peningkatan moral petugas pemungut atau dinas yang melakukan penagihan retribusi agar tidak terjadi kebocoran. 3. Retribusi harus digunakan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada wajib retribusi, agar tidak merasa, tidak ada manfaatnya membayar retribusi.

Tabel 3
Lanjutan ...

Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
1. Penarikan “keamanan” oleh oknum di luar dinas (preman) yang menyebabkan obyek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah missal retribusi pasar	1. Pengetatan sistem agar tidak ada premanisasi, dalam pemungutan di dalam retribusi daerah.	1. Peningkatan kualitas SDM yang berkecimpung di dalam penagihan retribusi, untuk menggunakan computer, supaya data tentang penerimaan retribusi tercatat di setiap periode. Dan ada rekam jejak data dari tahun ke tahun.
2. Preseden buruk karena tidak / belum pernah ditegakkan Perda tentang retribusi pasar.	2. Penungakan retribusi, harus ditagih. Walau besarnya kecil, akan tetapi hal tersebut sangat bermanfaat.	2. Perlunya monitoring dalam penyetoran retribusi ke DPPKAD harus disertai dengan bukti yang menunjukkan, bahwa pendapatan retribusi pada suatu periode adalah jumlah yang sebenarnya.
	3. Perda yang belum dijalankan sesuai ketentuan, mesti diterapkan demi peningkatan penerimaan retribusi.	
	4. Bekerjasama dengan kepolisian untuk mengurangi atau memberantas preman, dengan melakukan sweeping.	

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Dalam analisis matriks SWOT ini dapat dibuat empat bentuk strategi, yaitu: (1) Strategi Kekuatan – Peluang (Strategi S-O) (Rangkuty, 1997). Strategi ini adalah upaya perencanaan memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada. (2) Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T) adalah upaya untuk memperkecil dan bila mungkin menghilangkan ancaman yang dihadapi. (3) Strategi Kelemahan-Peluang (Strategi W-O) adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan-perencanaan untuk menangkap peluang-peluang yang ada. (4) Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T) yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada.

Berdasarkan matrik SWOT diatas diperoleh ranking yang menunjukkan skala prioritas strategi yang harus disiapkan dalam peningkatan potensi PAD di Kabupaten Blora untuk komponen retribusi daerah. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Blora berdasarkan analisis SWOT urutannya dapat dilihat dari ranking tertinggi ke yang terendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah dari analisis SWOT:

1. Sosialisasi manfaat pajak daerah bagi pembangunan Kabupaten Blora.
2. Survey langsung mengenai potensi pajak daerah, berapa besarnya potensi yang bisa digali, apakah pelaporan pajak sesuai dengan kenyataannya.
3. Penambahan petugas untuk mengurus masalah pajak daerah.

4. Pajak yang belum ada Perdanya perlu segera dibuat payung hukumnya, missal pajak galian golongan c.
5. Penetapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.
6. Penggunaan teknologi yang modern, atau komputerisasi di tiap-tiap dinas yang mengurus masalah pajak, saling terhubung, sehingga tidak ada kebocoran, dan bisa dicek berapa besarnya penerimaan pajak yang masuk secara terpusat (dengan menggunakan sistem online).
7. Keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan biaya yang tinggi, agar wajib pajak tidak ada tunggakan di kemudian hari.
8. Pendataan obyek wajib pajak yang belum kena pajak.

Saran

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi harus juga memberikan manfaat buat wapa retribusi secara tidak langsung. Agar wajib retribusi tidak merasa “tidak ada manfaat yang berarti, dengan membayar retribusi”.
2. Retribusi digunakan untuk memberikan retribusi pelayanan yang lebih baik.
3. Petugas penagih retribusi harus lebih telaten, dalam menagih besarnya retribusi, supaya tidak ada tunggakan dan tidak ada wajib retribusi yang terlewatkan.
4. Bila terjadi penunggakan, tunggakan tersebut tetap harus diminta, karena akan memberikan dampak bagi besarnya PAD Kabupaten Blora.
5. Perlu mengkaji besarnya tarif retribusi yang ditetapkan di dalam Perda agar nila PAD semakin meningkat.
6. Penegakkan Perda retribusi.
7. Pengetatan sistem, agar tidak terjadi premanisme di dalam penagihan retribusi Misal di pasar / terminal / jalan umum.
8. Perlunya monitoring agar tidak terjadi kebocoran, dengan penggunaan teknologi yang canggih.
9. Perda mengenai besarnya tariff retribusi yang tidak rasional, karena tarifnya sangat rendah perlu segera direvisi, agar penerimaan daerah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Blora Dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik

Blora Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik

Blora Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik

Kesit Bambang Prakoso.2003. Pajak dan Retribusi Daerah.Yogyakarta. UII Press

Mahmudi.2002. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Rahardjo Adisasmita.2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Graha Yogyakarta. Graha Ilmu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rangkuty, Freddy (1997). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Dengan Analisis SWOT. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.